DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia 1993)

A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007)

Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana Lanjut,(Semarang; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum,2009)

----------, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta;Kencana, 2010)

----------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, (Jakarta; Kencana, 2011)

Dirjen Imigrasi, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, (Jakarta;Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum Dan HAM RI 2005)

Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi Revisi)*. (Bandung. Remaja Rosdakarya Ofset : 2008)

M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional* (Jakarta; UI-Press)

Mahkamah Konstitusi, *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta;2013)

Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta;PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011)

Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2009)

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, RajaGrafindo Persada : 2004)

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2009)

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika :2010)

PERATURAN-PERATURAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp. 0,- (Nol Rupiah) Bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia

BAHAN LAINYA

1. www.imigrasi.co.id
2. www.bin.go.id
3. www.bappedakaltim.com
4. www.wikipedia.com
5. www.equator-news.com
6. Ahmad Bahiej, Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana